

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
(RKT OPD)**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (RKT OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RKT OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RKT memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran, serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Sesuai dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengamanatkan setiap daerah provinsi, kabupaten dan kota untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun yang merupakan hasil kesepakatan seluruh stakeholder. RKPD disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip perencanaan yang baik dimana harus ada keseimbangan antara perencanaan teknokratis, partisipatif, politis, bottom-up serta top-down.

Dokumen RKT Sekretariat Daerah Tahun 2018 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2019. Disamping itu, RKT yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategi pembangunan. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di wilayah Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. RKT pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan RKT dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja dan review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2. LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum RKT Sekretariat Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2019 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan dan Penerapan RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2019 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

b. Tujuan

Rencana KKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);

3. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terciptanya pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Bagian –Bagian pada Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan
6. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RKT Sekretariat Daerah Tahun 2019 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2019 dan capaian Renstra OPD, Analisis kinerja pelayanan OPD, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal OPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 2019

- 3.1 Tujuan dan Sasaran RKT Sekretariat Daerah
- 3.2 Program dan Kegiatan RKT Sekretariat Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 telah dijadikan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 dan kemudian menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2016 dan perkiraan target tahun 2019. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada OPD di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar OPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI OPD

a. Kondisi Organisasi dan Aparatur.

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada OPD di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar OPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

b. Kondisi Sosial dan Budaya

Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya.

Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilai-nilai adat, budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2019 masih ditemui kendala-kendala, sehingga beberapa program dan kegiatan belum berjalan optimal sebagaimana yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang masih belum optimal pelaksanaannya diantaranya terlihat pada masih rendahnya serapan dana yang telah dialokasikan untuk program atau kegiatan dimaksud. Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

a. Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab. Pessel

Permasalahan:

- Sulit mengidentifikasi ajaran-ajaran Aliran Kepercayaan masyarakat.
- Belum adanya mekanisme yang baku tentang proses pengawasan dan pelarangan aliran kepercayaan yang diduga sesat.

b. Operasionlasisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kab. Pessel

Permasalahan:

- Sulitnya memetakan potensi konflik secara rinci masing-masing Kecamatan disebabkan karena kondisi masyarakat yang dinamis.
- Sulitnya memantau potensi konflik dimasing-masing Kecamatan.
- Terbatasnya sarana mobilitas.

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

a. Komunitas Intelijen Daerah

Permasalahan:

- Masing-masing unsur memiliki keterbatasan waktu untuk rapat koordinasi sehingga koordinasi formal (rapat) lebih sedikit tetapi koordinasi non formal yang lebih menonjol.
- Sumber daya manusia yang ada belum memiliki keahlian Intelijen atau belum ada yang ikut Diklat Intelijen.
- Latar pendidikan staf di bidang politik belum ada.

b. Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Permasalahan:

- Banyaknya tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan untuk diselesaikan oleh Kesbangpol sementara kegiatan yang tersedia tidak mampu menampungnya.

3. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

a. Kegiatan Forum Kewaspadaan dini masyarakat

Permasalahan:

- Berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2006, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dibentuk ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan/desa. Pada saat ini yang telah dibentuk baru ditingkat Kabupaten sehingga informasi tentang gangguan keamanan dan bencana alam belum terhimpun secara merata.
- Belum adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki latar belakang Sosiologi.

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

a. Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

Permasalahan:

- Banyaknya target sasaran yang harus diberikan sosialisasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika sementara anggaran yang ada tidak memadai untuk dilakukannya Sosialisasi.

- Belum adanya Puskesmas yang menjadi Instansi Penerima Wajib Laport di Kabupaten Pesisir Selatan.
- Belum adanya panti rehabilitasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

5. Program Pendidikan Politik masyarakat

- a. Monitoring dan Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai UU Keormas

Permasalahan:

- Banyaknya pendirian Ormas/LSM yang tidak memberi pemberitahuan ke Kesbangpol.
- Perubahan data Kepengurusan Ormas/LSM yang ada tidak di update.

6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan daerah.

Permasalahan :

- Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat laport bulanan yang terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan.

7. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- a. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

Permasalahan :

- Belum adanya tersedia sistem aplikasi yang dapat menyimpan data – data kepegawaian serta arsip-arsip kepegawaian secara on line / komputerisasi.

8. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda

- a. Kegiatan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan :

- Pokja Pengadaan Barang dan Jasa masih bersifat *Adhoc*, sehingga proses pengadaan barang dan jasa kurang fokus, karena anggota pokja masih dibebani dengan tanggung jawab di instansi asal mereka.

9. Program Pemantapan Otonomi Daerah

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Permasalahan :

- Kurangnya perhatian dari Kepala Perangkat Daerah dalam penyampaian data, sehingga data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah tidak valid, ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data pendukung yang diberikan.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penunjang terlaksananya Kegiatan Penyusunan LPPD
- Kurangnya petunjuk teknis dalam penyusunan LPPD

10. Program Advokasi Pemerintah Daerah

a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Hukum

Permasalahan :

- Adanya persoalan dalam hal pengalihan hak oleh Camat selaku PPAT dalam perbuatan hukum jual beli, hibah dan lain sebagainya sehingga terjadi persoalan hukum yang berakhir pada lembaga peradilan.
- Permasalahan ganti rugi oleh Pemerintah Daerah terhadap tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum.
- Permasalahan Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan izin sebagainya.

11. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

a. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)

Permasalahan :

- Masih belum aktifnya sekretariat UKS kecamatan dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang ada pada tiap jenjang pendidikan .
- Pembangunan lokal baru **tidak diiringi** dengan pembangunan toilet dan tempat cuci tangan baru
- Para pengambil kebijakan kurang respon terhadap kegiatan UKS ini.

12. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Permasalahan :

- Belum terdistribusinya koran ke Nagari-nagari secara merata
- Banyaknya media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers

- Banyak wartawan yang belum memiliki kompetensi dari organisasi profesi dari organisasi profesi

b. Kegiatan Publikasi dan Promosi Daerah

Permasalahan :

- Terlalu banyak media yang bekerja untuk mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah
- Publikasi di Media Sosial Terkait Kegiatan Pemerintah Daerah Yang Masih menggunakan Perangkat Pribadi

c. Kegiatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah

Permasalahan :

- Masih menggunakan media Konvensional/ pajangan
- Proses penyimpanan Foto dan Video yang terbatas

13. Program Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur

a. Kegiatan Monev Kinerja SKPD

Permasalahan :

- Kurangnya respon Perangkat Daerah dalam memenuhi permintaan data untuk Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
- Sering tidak tepat waktu penyampaian data penilaian kinerja Perangkat

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019

A. TUJUAN

Tujuan yang diinginkan dalam RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan aparatur yang efektif dan efisien.
2. Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Meningkatnya peran serta aparat Pemerintah dalam Bidang Perlindungan Masyarakat.

B. SASARAN

Sasaran dari RKT Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka merevitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya pelayanan publik yang efektif dan efisien
3. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah
4. Meningkatnya peran serta Pemerintah Daerah dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan
5. Meningkatnya Peran Struktur Sosial dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba dan Obat-obat terlarang.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 merupakan pedoman program dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam tabel program dan kegiatan ini dilengkapi dengan Indikator Kinerja Program dan kegiatan Tahun 2019. Untuk selengkapnya rincian program dan kegiatan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN		
		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	BB
			Nilai LPPD Setda Tingkat Propinsi	Peringkat 5
	Peningkatan Pengawasan Akuntabilitas Kinerja Aparatur		Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten	BB
			Peningkatan Peningkatan LPPD	3230
			Persentase tahapan penyampaian dokumen LKPJ Bupati	100%
		Monev Kinerja SKPD	Jumlah Laporan monev Kinerja Perangkat daerah	4 Laporan
		Penyusunan LAKIP Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Perangkat Daerah yang menyampaikan Lkj tepat waktu	45 PD
		Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Jumlah dokumen LPPD	1 dok
		Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Jumlah Dokumen LKPJ	1 dok
	Pelayanan Administrasi Perkantoran		Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kerja	<u>12 Bulan</u>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya layanan surat menyurat / pramu kantor	12 Bulan

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening listrik, air dan telepon	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya biaya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya operasional untuk kebersihan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya biaya perawatan peralatan kerja	12 Bulan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	12 Bulan
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Rumah Dinas (KDH)	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan Rumah Dinas (KDH)	12 Bulan
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan minum untuk rapat dan tamu	12 Bulan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 Bulan
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 Bulan
		Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (KDH)	Tersedianya biaya perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi keluar daerah (KDH)	12 Bulan
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor pengelola keuangan	12 Bulan
		Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang dihasilkan	6 Dokumen
		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS	Jumlah tenaga kerja kontrak yang dibayarkan	12 orang

		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor	12 Bulan
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Aset Setda yang dikelola dalam kondisi baik	85%
		Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah Daerah	Jumlah Dokumen Aset/barang daerah lingkup Setda	4 Dokumen
2. Meningkatnya pelayanan Publik yang efektif dan efisien			Persentase OPD yang pengelolaan pelayanan publik baik	80%
	Pengembangan Manajemen Pelayanan Publik		Tingkat Kepuasan Masyarakat	<u>BB</u>
		Peningkatan Manajemen Pelayanan Publik	Jumlah laporan pelayanan publik	4 Laporan
		Fasilitasi Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah inovasi pelayanan publik yang difasilitasi	2 inovasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah PD pelayanan publik yang disurvei	15 OPD
	Penataan Kelembagaan dan Ketatausahaan Pemda		Persentase penataan kelembagaan dan ketatausahaan Pemda	<u>90%</u>
		Penataan dan Penguatan Kelembagaan	Laporan Forum Kelembagaan	45 Laporan
		Penataan Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen standar kompetensi jabatan	45 Laporan
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase Aparatur yang berkompeten	<u>90%</u>
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	8 orang
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	100%
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah			Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	80%

	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Rancangan Produk Hukum yang difasilitasi	95%
			Persentase Produk Hukum yang dipublikasi	95%
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Bupati	Jumlah Peraturan Bupati yang difasilitasi	50 dokumen
		Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang difasilitasi	8 dokumen
		Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Lembaran daerah yang dipublikasi	270 buku
			Jumlah berita daerah yang dipublikasi	270 buku
		Validasi Keputusan Bupati dan Evaluasi/ Klarifikasi Peraturan Nagari	Jumlah Keputusan Bupati yang divalidasi	550 dokumen
			Jumlah Peraturan Nagari yang dievaluasi	10 Dokumen
	Advokasi Pemerintah Daerah		Persentase Sangketa Hukum yang difasilitasi	90%
		Penyelesaian Sengketa Hukum	Jumlah perkara hukum yang diselesaikan	10 kasus
	Kerjasama Informasi dengan Media Massa		Jumlah kerjasama dengan Media Massa dalam penyebaran informasi daerah yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku	27 Media Massa
		Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah kerja sama dengan Media Massa	27 Media Massa
		Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kegiatan pemerintah daerah	2500 lembar Cetak Foto, 100 video, 80 spanduk
		Publikasi dan Promosi Daerah	Jumlah publikasi dan promosi daerah	50 kali
	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Persentase pelelangan yang sesuai dengan aturan yang berlaku	95%
			Persentase pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui SPSE	35%

		Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	24 kali
		Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik	Jumlah badan/lembaga yang difasilitasi dalam pelayanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	
		Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen evaluasi, pelaporan dan pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 Dokumen
		Pembinaan dan Konsultasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peserta pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	15 orang
		Fasilitasi Lelang dan Klarifikasi PBJ	Jumlah Fasilitasi dan Klarifikasi Lelang	175 paket
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja	<u>12 Bulan</u>
		Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	100%
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor	100%
		Pengadaan Meubiler	Terlaksananya Pengadaan Meubiler	100%
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	Terpeliharanya Peralatan Rumah Dinas/Jabatan	12 Bulan
		Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	12 Bulan
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Meubiler	Terpeliharanya Meubiler	12 Bulan
		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan
		Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	12 bulan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terpeliharanya perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	12 Bulan
		Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	100%

	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Persentase Arsip Sekretariat Daerah yang terkelola dengan baik	85%
		Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah arsip Lingkup Setda yang ditata	2500 berkas
	Peningkatan Disiplin Aparatur (KDH)		Persentase Disiplin Aparatur dalam berpakaian dinas	85%
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapan (KDH)	Terlaksananya pakaian dinas beserta perlengkapan (KDH)	65 stel
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Pemeringkatan Kompetensi Camat	6 Besar tingkat Provinsi
			Persentase pengelolaan administrasi kepegawaian yang difasilitasi	
		Penilaian Kompetensi Camat/ASN	Jumlah Camat terbaik	3 Camat Terbaik
			Nilai Peringkat Tingkat Provinsi	3 besar
			Jumlah Peserta Workshop	30 orang
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		Persentase penyampaian perkembangan Fisik dan Keuangan OPD sesuai target dan tepat waktu	75%
		Penyusunan Prosedur Kegiatan	Jumlah dokumen prosedur kegiatan yang disusun	2 Dokumen
		Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen laporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Daerah	12 Dokumen
		Pengendalian Program Pembangunan Daerah	Jumlah rapat evaluasi dan monitoring program pembangunan daerah yang dilaksanakan	4 kali
		Koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi Pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	12 kali
		Penyusunan Harga Satuan Pokok Kegiatan	Jumlah dokumen HSPK yang disusun	1 dokumen
			Jumlah dokumen standar harga barang yang disusun	1 dokumen

		Pemantapan dan Optimalisasi Fungsi Staf Ahli Bupati	Jumlah Rekomendasi Staf Ahli Bupati	24 rekomendasi
		Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Umum, Organisasi dan Keuangan	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Administrasi Umum	12 Bulan
		Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan
		Optimalisasi Fungsi Koordinasi Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Jumlah Koordinasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	12 Bulan
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah		Jumlah pelaksanaan keprotokoleran Pemerintah Daerah	50 kali
		Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen /Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri	Jumlah Kunjungan Kerja Pejabat Negara yang difasilitasi	80 kali
		Peningkatan Etos Kerja Keprotokolan	Jumlah Pelaksanaan Keprotokolan	80 kali
		Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pelayanan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yang dilakukan	
	Pemantapan Otonomi Daerah		Persentase tahapan penegasan batas wilayah administrasi pemerintahan	<u>35%</u>
			Persentase Tahapan Pembakuan Nama Rupa Bumi	<u>100%</u>
			Persentase Nagari Binaan Perantau	<u>18%</u>
			Persentase Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<u>68%</u>
			Jumlah Kerjasama dengan Pihak Ketiga	<u>15 MoU</u>
			Persentase kehadiran stakeholders pada rapat koordinasi pimpinan daerah	<u>90%</u>
		Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten	Jumlah rapat koordinasi camat dan wali nagari	2 kali

			Jumlah Rakor camat dengan perangkat daerah	3 kali
		Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Rakor Gubernur dengan Kabupaten Kota	4 kali
			Jumlah fasilitasi serah terima jabatan camat	5 kali
			Jumlah penyelesaian permasalahan di kecamatan	5 kali
		Koordinasi dan Pembinaan Kewilayahan	Jumlah Rakor kecamatan yang dihadiri	15 kali
			Laporan Evaluasi pelaksanaan Tupoksi Camat	1 Dokumen
		Penamaan Rupa Bumi dan Unsur Alami	Laporan nama rupa bumi dan unsur buatan	1 Dokumen
		Fasilitasi Penegasan Batas Daerah dan Kecamatan	Jumlah fasilitasi penetapan dan penegasan batas nagari	40 Nagari
		Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah	Jumlah Mou dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antar daerah	1 MoU
			Jumlah asistensi MoU kerjasama dengan pihak ketiga	7 MoU
		Fasilitasi Kerjasama Rantau	Jumlah fasilitasi nagari binaan perantau tingkat Kabupaten	3 Nagari
	Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan		Persentase Agen dan Pangkalan BBM dan Gas sesuai HET	85%
			Persentase peningkatan pengawasan terhadap energi baru dan terbarukan	80%
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Energi Bersubsidi	Jumlah pangkalan LPJ 3 Kg/Gas dan BBM yang dimonev	60 pkl
	Peningkatan Promosi dan Kejasama Investasi		Jumlah investor yang melaksanakan investasi di daerah	2 Investor
		Pameran Apkasi dan Sumbar Expo	Jumlah Pameran Apkasi yang diikuti	1 kali
	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		Jumlah rekomendasi untuk Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	1 Rekomendasi
		Forum Pengendalian Harga dan Inflasi Daerah	Jumlah Rapat TPID yang dilaksanakan	2 kali

	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Pedagang		Persentase distributor dan Kios pupuk yang bersubsidi sesuai HET	<u>15%</u>
		Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah kios pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi	115 Kios
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Tata Niaga Bahan Bakar Bersubsidi	Jumlah pangkalan LPJ 3 Kg/Gas dan BBM yang dimonev	60 pkl
	Perencanaan Pembangunan Ekonomi		Persentase Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	<u>100%</u>
		Koordinasi Peningkatan Ekonomi Pesisir Selatan	Jumlah rapat koordinasi peningkatan ekonomi Pesisir Selatan	
	Pendidikan dan Politik Masyarakat		Persentase Jumlah Ormas /LSM yang memenuhi syarat administrasi yang lengkap	<u>85%</u>
		Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah	Jumlah Pemantauan, Pelaporan, dan Perkembangan Politik di Daerah	12 kali
		Monitoring Evaluasi Keberadaan Ormas/LSM sesuai dengan Undang-Undang Keormasan	Jumlah Ormas yang mendapat pembinaan	40 ormas
		Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai	Jumlah Parpol yang mengajukan bantuan keuangan yang diverifikasi	15 Parpol
	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan		Jumlah Kasus yang ditangani atau di Fasilitasi	4 Kasus
		Peningkatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Kab.Pessel	Jumlah aliran kepercayaan yang diawasi	5 Aliran
		Operasionalisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial	Jumlah konflik sosial yang difasilitasi	21 rekomendasi
		Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)	Jumlah rekomendasi koordinasi Pimpinan Daerah	4 rekomendasi
	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		Jumlah Rekomendasi kebijakan pencegahan gangguan keamanan Nasional di Daerah	5 Rekomendasi

			Persentase Penurunan Pungli di Kabupaten Pesisir Selatan	85%
		Koordinasi dan Konsultasi Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah rapat koordinasi pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	35 kali
		Operasionalisasi Unit bantuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah Sosialisasi Pencegahan Pungutan Liar	
		Operasionalisasi Unit Bantuan Tugas Sapu Bersih Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan	Jumlah kasus pungutan liar yang ditangani	3 kasus
	Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Jumlah Rekomendasi kebijakan untuk pencegahan dan penanggulangan potensi konflik dimasyarakat	5 Rekomendasi
		Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah rapat koordinasi tim kewaspadaan dini daerah	4 kali
			Jumlah Rapat Koordinasi Forum Kewaspadaan dini masyarakat	4 kali
	Pengembangan Wawasan Kebangsaan		Persentase Kehadiran Stakeholders dalam mengikuti Sidang Paripurna DPRD dalam Rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pesisir Selatan	<u>90%</u>
			Persentase Peserta yang memahami pengetahuan Wawasan Kebangsaan dan Kesadaran Bela Negara	<u>85%</u>
		Pelaksanaan Upacara Kesadaran Nasional dan Hari Besar Lainnya	Jumlah pelaksanaan upacara hari kesadaran nasional dan hari besar lainnya	22 kali
		Peringatan Hari Jadi Pesisir Selatan	Jumlah undangan yang hadir	1200 orang

			Jumlah sidang paripurna	1 kali
		Pelaporan RANHAM	Jumlah Laporan RanHam	10 Laporan
			Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemda	100%
4. Meningkatnya Peran serta Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Keagamaan dan Sosial kemasyarakatan			Persentase peran serta Pemerintah Daerah dalam Kegiatan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	100%
	Pengembangan Lingkungan Sehat		Persentase Sekolah yang menerapkan Lingkungan Sehat	<u>90%</u>
		Monitoring dan Evaluasi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	Jumlah UKS yang dibina	4 sekolah
	Peningkatan IMTAQ		Tingkat Kepuasan terhadap pelayanan Jemaah Haji oleh Pemerintah Daerah	<u>100%</u>
			Peringkat MTQ Pesisir Selatan	5 besar
			Persentase kunjungan Mesjid Tim Silaturahmi Pemda	65%
			Persentase Mesjid yang dapat Hibah Bansos	70%
		Peningkatan Imtaq bagi Pegawai di Lingkugan Pemda Kab. Pessel dan Penyelenggaraan Hari Besar Islam	Jumlah ceramah agama yang dilaksanakan	24 kali
		Tim Silaturahmi Pemerintah Daerah	Jumlah safari Pemerintah daerah yang dilakukan	60 kali
		Persiapan dan Penyelenggaraan MTQ	Jumlah cabang MTQ yang diikuti	10 cabang
			Peringkat MTQ tingkat Propinsi	5 besar
		Fasilitasi Jemaah Haji	Jumlah Tenaga Pendamping Haji Daerah (TPHD)	1 orang

			Jumlah Jemaah Haji yang difasilitasi	115 orang
		Peningkatan Kapasitas KAN	Jumlah KAN yang dibina	37 KAN
		Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Kesejahteraan Rakyat dan Urusan Keagamaan yang dilaksanakan	12 kali
		Verifikasi Pemberian Hibah dan Bantuan sosial	Jumlah proposal Hibah bansos mesjid yang diverifikasi	150 Proposal
		Lomba Didikan Subuh Tergiat	Jumlah Lembaga Didikan subuh yang dikunjungi	15 kali
		Pembinaan Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Al Quran	Jumlah Pondok Pesantren, MDTA, dan Pondok Alquran yang dibina	15 unit
		Sosialisasi Standarisasi MDQ, TPQ/TPSQ	Jumlah sosialisasi Standarisasi MDQ TPQ/TPSQ yang dilaksanakan	3 Kali
	Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		Peringkat Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	5 besar
		Pembinaan Hasil Karya Pemuda Pelopor	Jumlah pemuda pelopor yang dibina	15 orang
	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga		Persentase PNS Yang Mengikuti Olah Raga	95%
		Pemasyarakatan Olahraga Aparatur	Jumlah kegiatan olahraga aparatur yang dilaksanakan	24 kali
			Persentase konflik yang tertangani	100%
4. Meningkatkan Peran Struktur Sosial dalam rangka mencegah Penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang			Jumlah Struktur Sosial yang aktif dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba dan obat-obat terlarang	31 kelompok anti narkoba
	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		Persentase pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan obat terlarang tingkat SLTP & SLTA	30 Sekolah
		Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika	Jumlah sosialisasi pencegahan penyalahgunaan narkotika	30 sekolah

BAB IV

PENUTUP

Di dalam Rencana Kinerja Tahunan ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Bagian – Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kinerja (RKT) dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen RKT 2019 ini sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2019 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Painan, Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. ERIZON, M.T.
NIP. 19630323 199003 1 005